



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-e dinkes@kapuashulukab.go.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ATAS
CAPAIAN HASIL EVALUASI TRIWULAN I
TIM KERJA PSDK RUJUKAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Ruang Bidang PSDK, Dinkes, PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KATHARINA ELLYANI RINYASARI, S. Tr.
Pangkat/Golongan : Keb.,M.A.P.
NIP : Penata Tk. I/ IIIId
Jabatan : 19840401 200604 2 009
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

Nama : INDRA ADIGUNA S.Si., M.A.P.
Pangkat/Golongan : Penata /III c
NIP : 19880223 200902 1 001
Jabatan : Tim Kerja Rujukan dan Khusus

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Capaian target kinerja Triwulan I kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan Rapat Evaluasi

Capaian Target Triwulan I Bidang Pelayanan Kesehatan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target 1 Th	Target & Realisasi	
				Target	Realisasi
				TW I	
1	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	3	3
2	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	23 Dokumen	0	0
3	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	23 Dokumen	3	0
4	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Izin	0	0
5	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	26 Dokumen	6	6
6	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rasio Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	90 %	90 %	88 %
7	Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5 Dokumen	0	0

Hasil Evaluasi:

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

- RSUD Badau:
 - Belum menganggarkan Dana Alokasi untuk Penanggung jawab pengelola keuangan.
 - Belum tersedianya obat, ATK dan bahan habis pakai yang dibelanjakan.
- RSUD Semitau:
 - belum membuat regulasi terkait SK Jasa dokter spesialis visite dan belum memiliki 3 dokter spesialis dasar sebagai syarat utama akreditasi.
 - Belum tersedianya obat, ATK dan bahan habis pakai yang dibelanjakan

Solusi:

- RSUD Badau :
 - Alokasi Anggaran untuk Penanggung jawab pengelola keuangan akan diusulkan di DPA Penyempurnaan 2024.
 - Untuk obat-obatan, ATK dan barang habis pakai belum bisa dibelanjakan diakrenakan belum tersedianya di E- Catalog.
- RSUD Semitau:
 - Salah satu persyaratan bekerja sama dengan dokter visite yaitu membuat SK penetapan standar jasa untuk kunjungan dokter sepsialis di RSUD.
 - Untuk obat-obatan, ATK dan barang habis pakai belum bisa dibelanjakan diakrenakan belum tersedianya di E- Catalog.
 -

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar.

Penyebab :

- Belum adanya SK Bupati Status tanggap bencana banjir sehingga tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan terdampak krisis bencana.

3. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Permasalahan:

- Belum membuat regulasi terkait SK Tim Kegawatdaruratan Medis Kabupaten.

- Belum mensosialisasikan ke puskesmas-puskesmas terkait pembentukan Tim Kegawatdaruratan di Kecamatan.

Solusi:

- Membuat SK Tim Kegawatdaruratan tingkat Kabupaten kemudian mensosialisasikan ke Seluruh Puskesmas

4. Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya

Penyebab :

- RSUD Badau: Belum adanya izin operasional IPAL.
- RSUD dr. Achmad Diponegoro: Izin operasional RSUD belum migrasi / terintegrasi dengan OSS sehingga tidak bisa mengeluarkan izin operasional Hemodialisa dan izin operasional radiologi.
- RSUD Semitau: Belum adanya izin instalasi listrik, izin rontgen dan penangkal petir.

Solusi :

- RSUD Badau : Untuk izin penangkal petir masih dalam proses pembangunan, untuk izin rontgen masih dalam proses dengan pihak ke 3.
- RSUD dr Achmad Diponegoro : Perlu berkoodinasi dengan Kementerian Investasi di Jakarta agar bisa membantu perizinan Operasional RSUD dr Achmad Diponegoro yang bermasalah dengan NPWP.

5. Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

Penyebab :

- Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal. daya tamping RS ada lah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu 271.584 berdasarkan data agregat kependudukan semester 2 tahun 2023 jadi terdapat kekurangan 31 bed dengan total bed Kapuas Hulu 240 bed.

Solusi :

- Perlu penambahan bed pasien sebanyak 31 bed.

6. Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar.

Permasalahan:

- RSUD dr . Achmad Diponegoro :
 - Belum adanya MoU antar Pemerintah Daerah dan UNDIP, UGM terkait kerjasama dokter interenship di RSUD Kabupaten Kapuas Hulu.
 - MoU Bidang Kesehatan yang sudah berakhir dan belum diperpanjang serta dalam proses.
 - Peraturan Daerah tentang tarif Rumah Sakit Tipe C masih dalam proses penetapan.
- RSUD Badau:
 - Belum terkreditasinya RSUD Badau terkait kurangnya SDM, belum adanya dokter spesialis dasar seperti : spesialis penyakit dalam dan spesialis kandungan.
 - Belum adanya pendampingan akreditasi terkait pelatihan PPI (Pengendalian Penyakit Infeksi) dasar.
 - Belum adanya regulasi standar tarif Perbup RS Tipe D.
 - Belum bekerjasama dengan BPJS.
- RSUD Semitau:
 - Belum terkreditasinya RSUD Semitau terkait kurangnya SDM, belum adanya dokter spesialis dasar seperti : spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan spesialis kandungan.
 - Belum optimalnya menggunakan rekam medik elektronik,
 - Belum adanya regulasi standar tarif Perbup RS Tipe D.
 - Belum bekerjasama dengan BPJS.
- Puskesmas:
 - Puskesmas Silat Hilir dan Silat Hulu belum menerapkan SISROUTE (Sistem Informasi Rujukan Terpadu).
 - Belum adanya pendampingan TPCB di Silat Hilir, Silat Hulu dan Bunut Hilir.

Solusi :

- RSUD dr . Achmad Diponegoro:
 - MoU antara Pemerintah Daerah dan UNDIP dalam proses pencairan dasar undang-undang pembayaran jasa untuk dokter spesialis interenship.
 - MoU Bidang Kesehatan telah dibahas kemudian tahap selanjutnya akan di bahas PKS (Perjanjian Kerja Sama) di Bidang Kesehatan antara Pemda Kapuas Hulu dan Pemda Sintang.

- Draft Perda tarif sudah diusulkan pada Badan Pendapatan Daerah namun masih menunggu proses penetapan SK Perda tersebut.
- RSUD Badau:
 - Jumlah SDM yang kurang akan dipenuhi dengan adanya penambahan sebanyak 29 orang tenaga P3K di RSUD Badau yang akan membantu dalam proses tim pokja akreditasi. Untuk dokter spesialis akan bekerja sama dengan dokter spesialis yang ada di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.
 - Pelatihan PPI akan dilaksanakan setelah tenaga P3K masuk di RSUD Badau.
 - Draft Perda tarif sudah diusulkan pada Badan Pendapatan Daerah namun masih menunggu proses penetapan SK Perda tersebut.
- RSUD Semitau:
 - Untuk rekam medik elektronik akan dilakukan pendampingan bersama tim rekam medis RSUD dr Achmad Diponegoro.
 - Untuk dokter Spesialis Penyakit Dalam akan bekerja sama dengan dokter spesialis yang ada di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.
 - Draft Perda tarif sudah diusulkan pada Badan Pendapatan Daerah namun masih menunggu proses penetapan SK Perda tersebut.
- Puskesmas :
 - Akan dilakukan pendampingan TPCB di awal Mei tahun 2024 di Puskesmas Silat Hilir, Silat Hulu dan Bunut Hilir.

7. Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus

Permasalahan :

- Perlu adanya ambulance untuk membantu mobilisasi pelayanan khusus.
- Terdapat 21 Puskesmas dan Rumah Sakit yang belum menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

Solusi :

- Perlu monitoring dan evaluasi secepatnya di bulan November dan Desember dan untuk puskesmas yang terkendala sinyal akan menginput Sistrute setelah pasien tersebut dirujuk dan sinyal optimal.

Dan diperoleh kesepakatan selambat-lambatnya (*Tiga Puluh*) hari semenjak ditanda tangani kesepakatan ini, agar dilakukan tindak lanjut hasil rekomendasi kesepakatan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu



KATHARINA ELLYANI RINYASARI, S. Tr. Keb.,M.A.P.
NIP. 19840401 200604 2 009

Pihak Kedua



INDRA ADIGUNA S.Si., M.A.P.
NIP. 19880223 200902 1 001